



# INDEKS DAYA SAING DAERAH TAHUN 2025

KABUPATEN  
KEPULAUAN SELAYAR

**Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan  
Inovasi Daerah**

 (0414) 21070

 <https://bapperida.kepulauanselayarkab.go.id>

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Laporan ini merupakan hasil kajian terhadap publikasi resmi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menjadi dasar dalam menilai kondisi daya saing daerah secara objektif dan terukur.

Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh skor IDSD sebesar 3,38 pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan kondisi faktual daerah dengan karakteristik kepulauan yang memiliki tantangan sekaligus potensi strategis. Skor tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan daya saing.

Upaya peningkatan daya saing daerah memerlukan komitmen berkelanjutan, sinergi lintas sektor, serta investasi jangka panjang dalam penguatan ekosistem inovasi, akses keuangan, dan konektivitas wilayah. Dengan tata kelola pemerintahan yang telah terbangun serta kualitas sumber daya manusia yang memadai, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki modal untuk mencapai kemajuan yang signifikan.

Laporan ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diarahkan pada dimensi yang membutuhkan penguatan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada BRIN atas publikasi IDSD 2025 serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng,                   Maret 2026.  
Kepala Bapperida Kepulauan Selayar,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19840104 200903 2 003

# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan Laporan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Sumber Data dan Metodologi	2
<b>BAB II CAKUPAN DAN KERANGKA IDSD 2025</b>	<b>4</b>
2.1 Kerangka Konseptual IDSD 2025	4
2.2 Konteks Nasional IDSD 2025	5
<b>BAB III CAPAIAN IDSD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025</b>	<b>5</b>
3.1 Skor IDSD Keseluruhan	6
3.2 Posisi dalam Peringkat Sulawesi Selatan	7
3.3 Capaian Per Komponen dan Pilar	8
3.3.1 Komponen Lingkungan Pendukung (Pilar 1–4)	9
3.3.2 Komponen Sumber Daya Manusia (Pilar 5–6)	10
3.3.3 Komponen Pasar (Pilar 7–10)	11
3.3.4 Komponen Ekosistem Inovasi (Pilar 11–12)	12
<b>BAB IV ANALISIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN</b>	<b>13</b>
4.1 Profil Kekuatan Daerah	13
4.2 Profil Kelemahan dan Tantangan Struktural	14
4.3 Analisis Komparatif dalam Konteks Sulawesi Selatan	15
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>16</b>
5.1 Kesimpulan	16
5.2 Rekomendasi Kebijakan	16
5.2.1 Penguatan Konektivitas Transportasi	17
5.2.2 Perluasan Akses Keuangan Inklusif	18
5.2.3 Penguatan Dinamika Bisnis dan Iklim Investasi	18
5.2.4 Pembangunan Ekosistem Riset dan Inovasi	18
5.2.5 Peningkatan Kapasitas Pasar Tenaga Kerja	19
5.2.6 Peningkatan Indeks Kesehatan Daerah	19
5.3 Penutup	19
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>iv</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>v</b>

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 3.1 Perbandingan Skor IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Referensi Pembanding Tahun 2025	6
Tabel 3.2 Peringkat IDSD Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025	7
Tabel 3.3 Skor IDSD per Pilar Kabupaten Kepulauan Selayar Dibandingkan Rata-rata Nasional Tahun 2025	8
Tabel 5.1 Matriks Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	17

## BAB I PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Daya saing daerah merupakan salah satu faktor mendasar yang menentukan kemampuan suatu wilayah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, setiap daerah dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas inovasinya—tidak hanya dalam skala domestik, tetapi juga di tingkat internasional. Kondisi ini menjadikan pengukuran dan pemantauan daya saing daerah sebagai kebutuhan yang semakin mendesak bagi para pengambil kebijakan.

Dalam konteks tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara konsisten menerbitkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai instrumen pengukuran tahunan yang valid dan dapat dipercaya. IDSD 2025, yang merupakan edisi keempat, dirancang untuk menilai tingkat daya saing daerah pada level provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejalan dengan berbagai literatur ilmiah yang menegaskan bahwa produktivitas merupakan inti dari daya saing—sebagaimana dikemukakan oleh Porter (1990), Onsel et al. (2008), dan Hanafi et al. (2017)—IDSD pada hakikatnya mencerminkan tingkat produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan standar hidup masyarakatnya.

IDSD 2025 mengacu pada kerangka konseptual *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF) yang telah disesuaikan dengan dinamika dan karakteristik daerah di Indonesia. Pengukuran mencakup 63 indikator untuk tingkat provinsi dan 50 indikator untuk tingkat kabupaten/kota, yang dikelompokkan ke dalam 12 pilar daya saing di bawah empat komponen utama: Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi. Dari total 508 kabupaten/kota yang diukur, sebanyak 484 berhasil dihitung skor IDSD-nya. Standarisasi data dilakukan menggunakan metode min-max sehingga menghasilkan skor pada rentang 0 hingga 5.

Bagi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan, pemahaman yang mendalam terhadap capaian IDSD

menjadi sangat penting. Kondisi geografis kepulauan menciptakan tantangan pembangunan yang khas, mulai dari keterbatasan konektivitas transportasi, tingginya biaya logistik, hingga sulitnya akses terhadap layanan keuangan dan infrastruktur dasar. Di sisi lain, kekayaan sumber daya alam bahari dan potensi pariwisata yang besar menyimpan peluang kompetitif yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Laporan ini hadir sebagai upaya memetakan kondisi tersebut secara sistematis dan berbasis data.

## 1.2 Tujuan Penulisan Laporan

Laporan ini disusun dengan tiga tujuan utama yang saling berkaitan. **Pertama**, menyajikan capaian IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 secara lengkap dan terstruktur berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh BRIN. **Kedua**, menganalisis kinerja daerah pada setiap pilar daya saing, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan faktor-faktor pembentuknya. **Ketiga**, memberikan rekomendasi kebijakan yang terukur, realistis, dan berbasis bukti (*evidence-based*) guna mendukung upaya peningkatan daya saing Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkelanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

## 1.3 Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup analisis IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, meliputi skor keseluruhan, skor per pilar dan komponen, posisi daerah dalam konteks Sulawesi Selatan dan nasional, serta analisis terhadap indikator-indikator pembentuk setiap pilar. Penyusunan laporan dibatasi pada data yang tercantum dalam publikasi resmi Data Dasar IDSD 2025 yang diterbitkan BRIN pada Desember 2025.

## 1.4 Sumber Data dan Metodologi

Seluruh data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari publikasi resmi Data Dasar Indeks Daya Saing Daerah 2025 yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi (ISSN: 2985-3303; DOI: 10.55981/brin.2438). Data-data pendukung merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai kementerian, lembaga, dan

institusi statistik resmi nasional, mencakup antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PANRB, Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum, serta berbagai lembaga lainnya.

Metodologi IDSD 2025 menggunakan standarisasi min-max dengan formula:

$$Skor_{i,d} = \left( \frac{N_{i,d} - N_{min_i}}{N_{max_i} - N_{min_i}} \right) \times 5$$

Di mana nilai minimum dan maksimum setiap indikator ditetapkan berdasarkan kebijakan nasional (RPJMN, Peraturan Menteri), standar global (GCI, UNDP, UNESCO), atau riwayat distribusi data. Skor akhir IDSD diperoleh melalui agregasi rata-rata aritmetika dari seluruh skor pilar dengan bobot yang sama.

## BAB II CAKUPAN DAN KERANGKA IDSD 2025

---

### 2.1 Kerangka Konseptual IDSD 2025

IDSD 2025 disusun berdasarkan empat komponen utama daya saing yang masing-masing dielaborasi lebih lanjut ke dalam 12 pilar daya saing.

#### **Komponen 1: Lingkungan Pendukung (Pilar 1–4)**

Komponen ini mencakup empat pilar, yaitu: (1) Pilar Institusi, yang menilai dukungan sosial-politik-hukum terhadap aktivitas ekonomi melalui dimensi keamanan, *checks and balances*, hak kepemilikan, transparansi, dan orientasi masa depan pemerintah; (2) Pilar Infrastruktur, yang menilai dukungan infrastruktur transportasi darat, kereta api, udara, dan laut, serta infrastruktur utilitas kelistrikan dan air; (3) Pilar Adopsi TIK, yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendorong transformasi Industri 4.0; dan (4) Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, yang mencerminkan nilai tambah, akumulasi modal, konsumsi, kinerja ekonomi, dan biaya hidup.

#### **Komponen 2: Sumber Daya Manusia (Pilar 5–6)**

Komponen ini terdiri dari dua pilar: (5) Pilar Kesehatan, yang mencerminkan kualitas hidup melalui Angka Harapan Hidup; dan (6) Pilar Keterampilan, yang berkaitan dengan penciptaan tenaga kerja produktif sesuai kebutuhan dunia usaha, diukur melalui rata-rata tahun sekolah, keterampilan lulusan, keterampilan digital, dan proyeksi tenaga kerja masa depan.

#### **Komponen 3: Pasar (Pilar 7–10)**

Komponen ini mencakup empat pilar: (7) Pilar Pasar Produk, yang mendorong efisiensi produksi melalui persaingan domestik; (8) Pilar Pasar Tenaga Kerja, yang menekan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja; (9) Pilar Sistem Keuangan, yang mencerminkan kemampuan lembaga finansial dalam memediasi aktivitas ekonomi; dan (10) Pilar Ukuran Pasar, yang memperkuat struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah.

## **Komponen 4: Ekosistem Inovasi (Pilar 11–12)**

Komponen ini terdiri dari dua pilar: (11) Pilar Dinamika Bisnis, yang mencerminkan kemudahan masuk dan keluarnya entitas bisnis; dan (12) Pilar Kapabilitas Inovasi, yang mengukur kemampuan daerah dalam menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

### **2.2 Konteks Nasional IDSD 2025**

Pada tingkat nasional, rata-rata skor IDSD 2025 yang dihitung dari seluruh provinsi berada pada angka 3,50 dari skala 5—meningkat dari 3,43 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan capaian daya saing daerah secara agregat di seluruh Indonesia. Pilar dengan peningkatan skor terbesar secara nasional adalah Pilar 2 (Infrastruktur) yang meningkat 0,40 poin dan Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi) yang meningkat 0,41 poin. Sebaliknya, pilar yang mengalami penurunan meliputi Pilar 6 (Keterampilan), Pilar 7 (Pasar Produk), Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja), dan Pilar 11 (Dinamika Bisnis).

Secara nasional, Pilar 10 (Ukuran Pasar) masih menjadi pilar dengan skor tertinggi, yaitu 4,38, sedangkan Pilar 7 (Pasar Produk) tetap menjadi pilar dengan skor terendah, yaitu 2,55. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi dan tingkat persaingan usaha di level daerah masih menjadi tantangan utama yang perlu ditangani secara sistematis di seluruh Indonesia.

## BAB III CAPAIAN IDSD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

### 3.1 Skor IDSD Keseluruhan

Kabupaten Kepulauan Selayar memperoleh skor IDSD sebesar 3,38 pada tahun 2025. Capaian ini berada di bawah rata-rata nasional (3,50), di bawah rata-rata kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan (3,53), serta jauh di bawah skor IDSD Provinsi Sulawesi Selatan (3,71). Posisi ini menempatkan Kabupaten Kepulauan Selayar pada peringkat ke-20 atau ke-21 dari 24 kabupaten/kota yang terukur di Sulawesi Selatan—setara dengan Kabupaten Enrekang yang juga memperoleh skor 3,38.

Tabel berikut menyajikan perbandingan skor IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berbagai referensi pembandingan:

*Tabel 3.1 Perbandingan Skor IDSD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Referensi Pembandingan Tahun 2025*

Referensi Pembandingan	Skor IDSD 2025
<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>3,38</b>
Rata-rata Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan	3,53
Provinsi Sulawesi Selatan	3,71
Rata-rata Nasional	3,50

Skor 3,38 mengindikasikan bahwa kapasitas daya saing Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada kategori sedang dan memerlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengejar ketertinggalan dari rata-rata regional dan nasional. Kesenjangan sebesar 0,12 poin dengan rata-rata nasional dan 0,15 poin dengan rata-rata kabupaten/kota Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa daerah ini memiliki ruang perbaikan yang nyata dan dapat dicapai dalam jangka menengah apabila intervensi kebijakan dilakukan secara tepat sasaran.

### 3.2 Posisi dalam Peringkat Sulawesi Selatan

Tabel berikut menyajikan peringkat seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan skor IDSD 2025. Kabupaten Kepulauan Selayar ditandai secara khusus pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 Peringkat IDSD Seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025**

Peringkat	Kabupaten / Kota	Skor IDSD 2025
1	Kota Makassar	4,17
2	Kota Parepare	4,10
3	Kota Palopo	3,79
4	Gowa	3,71
5	Maros	3,69
6	Tana Toraja	3,63
7	Sinjai	3,58
8	Bulukumba	3,55
9	Sidenreng Rappang	3,52
10	Jeneponto	3,51
11	Pinrang	3,50
12	Takalar	3,49
13	Toraja Utara	3,49
14	Barru	3,47
15	Bantaeng	3,47
16	Wajo	3,43
17	Bone	3,42
18	Soppeng	3,41
19	Pangkajene dan Kepulauan	3,40
20	Enrekang	3,38
<b>21</b>	<b>Kepulauan Selayar</b>	<b>3,38</b>
22	Luwu	3,36
23	Luwu Utara	3,19
24	Luwu Timur	3,13

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo menjadi tiga daerah dengan skor IDSD tertinggi di Sulawesi Selatan—ketiganya merupakan daerah perkotaan dengan akses infrastruktur, pasar, dan layanan keuangan yang jauh lebih memadai. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya unggul dari Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur yang terletak di wilayah pedalaman timur Sulawesi Selatan. Kondisi ini mencerminkan adanya pola kesenjangan daya saing yang berkorelasi dengan faktor aksesibilitas dan keterpencilan geografis.

### 3.3 Capaian Per Komponen dan Pilar

Tabel berikut menyajikan rincian skor Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap pilar IDSD 2025 beserta perbandingannya terhadap skor nasional:

*Tabel 3.3 Skor IDSD per Pilar Kabupaten Kepulauan Selayar Dibandingkan Rata-rata Nasional Tahun 2025*

Pilar	Nama Pilar	Komponen	Skor Selayar	Skor Nasional	Status
P1	Institusi	Lingkungan Pendukung	4,61	4,30	Di atas nasional
P2	Infrastruktur	Lingkungan Pendukung	3,27	3,37	Di bawah nasional
P3	Adopsi TIK	Lingkungan Pendukung	4,36	3,68	Di atas nasional
P4	Stabilitas Ekonomi Makro	Lingkungan Pendukung	4,10	4,02	Di atas nasional
P5	Kesehatan	Sumber Daya Manusia	3,69	3,79	Di bawah nasional
P6	Keterampilan	Sumber Daya Manusia	4,53	3,67	Di atas nasional
P7	Pasar Produk	Pasar	2,40	2,55	Di bawah nasional
P8	Pasar Tenaga Kerja	Pasar	2,45	2,96	Di bawah nasional
P9	Sistem Keuangan	Pasar	2,65	2,90	Di bawah nasional
P10	Ukuran Pasar	Pasar	3,72	4,38	Di bawah nasional
P11	Dinamika Bisnis	Ekosistem Inovasi	2,50	2,79	Di bawah nasional

Pilar	Nama Pilar	Komponen	Skor Selayar	Skor Nasional	Status
P12	Kapabilitas Inovasi	Ekosistem Inovasi	2,25	3,54	Di bawah nasional

### 3.3.1 Komponen Lingkungan Pendukung (Pilar 1–4)

Komponen Lingkungan Pendukung merupakan kekuatan utama Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari empat pilar yang membentuk komponen ini, tiga pilar berhasil melampaui rata-rata nasional.

Pilar 1 (Institusi) mencatat skor 4,61—tertinggi di antara seluruh pilar dan melampaui rata-rata nasional 4,30. Capaian ini didukung oleh indikator-indikator yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang kuat. Transparansi Anggaran mencapai skor sempurna (5,00), menunjukkan kualitas pertanggungjawaban fiskal yang sangat baik. Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi keduanya mencapai nilai maksimum (5,00), serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencatat skor 4,94. Tingkat Pengelolaan Lingkungan yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga berada di angka 4,85, mencerminkan komitmen daerah terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu aspek yang masih perlu perhatian adalah Hak atas Kepemilikan (2,94) dan Kualitas Administrasi Pertanahan (4,83), yang perlu terus diperkuat untuk mendukung kepastian hukum dalam berinvestasi.

Pilar 3 (Adopsi TIK) mencapai skor 4,36, jauh melampaui rata-rata nasional 3,68. Pengguna Telepon Seluler mencapai nilai tertinggi (5,00) dan Jangkauan Jaringan 4G berada di angka 4,49, menunjukkan penetrasi teknologi komunikasi yang sangat tinggi. Pengguna Internet mencatat skor 3,58. Tingginya adopsi TIK merupakan modal digital yang sangat berharga bagi pengembangan ekonomi berbasis teknologi ke depan.

Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro) mencatat skor 4,10, sedikit di atas rata-rata nasional 4,02. Indikator Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi memperoleh skor tertinggi dalam pilar ini (4,98), menunjukkan konsistensi pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan Deflator PDRB (4,71) dan Indeks Ketahanan Pangan (4,05) juga berada di level yang memadai. Nilai Investasi mencapai 4,15. Satu-satunya kelemahan dalam pilar ini adalah Kapasitas Fiskal

Daerah yang hanya mencapai 2,62, mengindikasikan ketergantungan daerah yang masih tinggi terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat.

Pilar 2 (Infrastruktur) menjadi titik lemah dalam komponen ini dengan skor 3,27, berada di bawah rata-rata nasional 3,37. Keterbatasan ini mencerminkan tantangan geografis yang melekat pada karakteristik kepulauan. Layanan Infrastruktur Kereta Api mencatat skor nol (0,00) karena memang tidak ada jaringan kereta api di wilayah ini, sementara Layanan Infrastruktur Bandara hanya mencapai 0,25. Layanan Infrastruktur Pelabuhan berada di angka 3,37, yang merupakan penopang utama konektivitas daerah. Di sisi positif, Rasio Elektrifikasi mencapai nilai maksimum (5,00), Pemenuhan SPM Aksesibilitas Jalan (5,00), dan Akses Air Minum Layak (4,76) menunjukkan bahwa layanan infrastruktur dasar di darat sudah terpenuhi dengan baik.

### **3.3.2 Komponen Sumber Daya Manusia (Pilar 5–6)**

Komponen Sumber Daya Manusia menunjukkan profil yang beragam antara kedua pilar pembentuknya.

Pilar 6 (Keterampilan) mencatat skor yang sangat tinggi, yaitu 4,53—jauh melampaui rata-rata nasional 3,67. Ini merupakan salah satu keunggulan komparatif paling menonjol yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar. Indikator Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil memperoleh skor sempurna (5,00), mengindikasikan ketersediaan angkatan kerja dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar mencapai 4,91, mencerminkan rasio yang ideal antara jumlah guru dan murid. Rata-rata Tahun Sekolah dan Angka Harapan Sekolah keduanya berada di angka 4,62, menunjukkan capaian pendidikan yang cukup baik. Keterampilan Lulusan mencatat skor 4,00 dan Berpikir Kritis dalam Mengajar mencapai 4,06.

Pilar 5 (Kesehatan) mencatat skor 3,69, berada di bawah rata-rata nasional 3,79. Pilar ini diukur terutama melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang mencerminkan kondisi kesehatan dan sosial ekonomi jangka panjang. Skor 3,69 mengindikasikan bahwa usia harapan hidup masyarakat Kepulauan Selayar masih perlu ditingkatkan. Mengingat Angka Harapan Hidup berubah secara bertahap karena dipengaruhi faktor-faktor struktural jangka panjang seperti pendidikan,

pendapatan, sanitasi, dan akses layanan kesehatan, peningkatan skor pilar ini memerlukan kebijakan kesehatan masyarakat yang konsisten dan berkelanjutan.

### 3.3.3 Komponen Pasar (Pilar 7–10)

Komponen Pasar secara keseluruhan menjadi kelemahan struktural terbesar Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan tiga dari empat pilarnya berada di bawah skor nasional. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan mendasar dalam pengembangan ekonomi berbasis pasar di daerah kepulauan.

Pilar 7 (Pasar Produk) hanya mencatat skor 2,40—lebih rendah dari rata-rata nasional yang sudah relatif rendah (2,55). Skor ini diukur melalui indikator Persaingan Sektor Jasa yang mencatat skor 2,40. Skor yang rendah ini mengindikasikan bahwa struktur pasar produk di Kepulauan Selayar masih terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu, dengan tingkat persaingan yang belum kondusif bagi tumbuhnya usaha-usaha baru yang inovatif. Sebagai kabupaten kepulauan dengan aksesibilitas terbatas, potensi monopoli lokal dalam beberapa sektor—terutama distribusi barang dan jasa—merupakan tantangan nyata yang perlu diatasi melalui kebijakan persaingan usaha yang lebih tegas.

Pilar 8 (Pasar Tenaga Kerja) mencatat skor 2,45, jauh di bawah rata-rata nasional 2,96. Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki mencatat skor yang relatif baik (4,64), mengindikasikan kondisi kesetaraan gender dalam remunerasi yang cukup positif. Namun, indikator Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif hanya mencapai 0,57—menunjukkan jangkauan Program Kartu Prakerja yang sangat terbatas dibandingkan jumlah angkatan kerja lokal. Upah Pekerja mencatat skor 2,14, mencerminkan kesenjangan antara upah rata-rata dengan upah minimum yang ditetapkan.

Pilar 9 (Sistem Keuangan) berada di angka 2,65, di bawah rata-rata nasional 2,90. Persentase Premi Asuransi Jiwa dan Non-Jiwa terhadap PDRB mencatat skor tertinggi dalam pilar ini (3,60), mengindikasikan tingkat penetrasi asuransi yang memadai. Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (KUR) berada di angka 2,82. Namun, indikator kritis Kredit Swasta terhadap PDRB hanya mencapai 1,54—jauh di bawah ambang yang optimal—mengindikasikan fungsi intermediasi keuangan yang masih sangat lemah. Keterbatasan akses kredit ini berimplikasi langsung

pada terhambatnya investasi usaha dan ekspansi kapasitas produksi, terutama bagi UMKM.

Pilar 10 (Ukuran Pasar) mencatat skor 3,72, meskipun masih di bawah rata-rata nasional yang tinggi (4,38). Skor ini ditopang oleh indikator PDRB ADHK 2010 yang mencapai 3,72—mencerminkan ukuran aktivitas ekonomi riil daerah yang cukup memadai. Skor pilar ini mengindikasikan bahwa meskipun ukuran ekonomi secara menyeluruh cukup signifikan, efisiensi dan kedalaman pasar domestik masih sangat terbatas.

### **3.3.4 Komponen Ekosistem Inovasi (Pilar 11–12)**

Komponen Ekosistem Inovasi mencatat kinerja paling rendah di antara keempat komponen, dengan kedua pilarnya jauh di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan mendasar dalam kapasitas daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi.

Pilar 11 (Dinamika Bisnis) mencatat skor 2,50, di bawah rata-rata nasional 2,79. Kinerja Pelayanan Publik yang diukur melalui penilaian PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) mencapai skor 3,68—merupakan satu titik terang dalam pilar ini. Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya mencatat skor 1,32, mengindikasikan perlambatan yang signifikan dalam laju pertumbuhan entitas usaha baru, sejalan dengan tren nasional yang mengalami perlambatan hampir di seluruh daerah.

Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi) mencatat skor terendah, yaitu 2,25—jauh di bawah rata-rata nasional 3,54 dengan selisih 1,29 poin. Kesenjangan yang sangat besar ini merupakan tantangan paling mendesak dalam profil daya saing Kabupaten Kepulauan Selayar sekaligus menjadi area dengan potensi peningkatan terbesar. Dari tujuh indikator pembentuk pilar ini, Aplikasi Merek Dagang mencatat skor tertinggi (4,24), diikuti oleh Keanekaragaman Tenaga Kerja (4,16) dan Aplikasi Kekayaan Intelektual (3,72). Namun, Indeks Keunggulan Lembaga Riset hanya mencapai 0,04—mendekati nol—mengindikasikan tidak adanya lembaga riset unggulan yang beroperasi di daerah ini. Belanja Riset tercatat sangat rendah (0,68), mencerminkan minimnya investasi daerah dalam penelitian dan pengembangan. Pengembangan Klaster hanya mencapai skor 1,69 dan Publikasi Ilmiah mencatat 1,21.

## BAB IV ANALISIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

---

### 4.1 Profil Kekuatan Daerah

Analisis terhadap data IDSD 2025 mengungkapkan sejumlah keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dan perlu dipertahankan serta dikembangkan lebih lanjut sebagai fondasi pembangunan.

#### 1. Tata Kelola Institusional yang Kuat

Skor Pilar 1 sebesar 4,61 melampaui rata-rata nasional (4,30) dan merupakan skor tertinggi yang dicapai Kepulauan Selayar. Keunggulan ini tercermin dari nilai sempurna pada transparansi anggaran, kinerja instansi pemerintah, dan reformasi birokrasi. Fondasi tata kelola yang kokoh ini merupakan prasyarat utama untuk menarik investasi, membangun kepercayaan pelaku usaha, dan menjamin kepastian hukum bagi kegiatan ekonomi.

#### 2. Tingkat Penetrasi Digital yang Tinggi

Dengan skor Pilar 3 sebesar 4,36—melampaui nasional 3,68—Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa masyarakatnya relatif adaptif secara digital. Penetrasi telepon seluler yang mencapai skor sempurna dan jangkauan jaringan 4G yang luas merupakan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi digital, layanan pemerintahan berbasis elektronik, serta ekosistem perdagangan daring yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas melampaui keterbatasan geografis kepulauan.

#### 3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Relatif Tinggi

Skor Pilar 6 (Keterampilan) sebesar 4,53—jauh melampaui rata-rata nasional 3,67—menempatkan Kepulauan Selayar sebagai salah satu daerah dengan kualitas SDM yang baik di Sulawesi Selatan. Ketersediaan angkatan kerja terdidik dan terampil merupakan modal manusia yang sangat berharga, khususnya untuk mendukung pengembangan sektor-sektor padat pengetahuan seperti pariwisata berstandar tinggi, pengolahan hasil laut, dan layanan berbasis teknologi.

#### 4. Stabilitas Ekonomi yang Terjaga

Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam tiga tahun terakhir (skor 4,98 pada indikator Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi), kondisi ketahanan pangan yang memadai, dan rasio elektrifikasi yang mencapai nilai penuh mencerminkan fondasi ekonomi makro yang stabil sebagai dasar pembangunan jangka panjang.

#### 4.2 Profil Kelemahan dan Tantangan Struktural

Di samping kekuatan yang dimiliki, terdapat sejumlah kelemahan struktural yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara sistematis.

##### 1. Kesenjangan antara Kekuatan Institusional dengan Kinerja Pasar dan Inovasi

Skor Pilar 1 yang mencapai 4,61 berbanding terbalik dengan skor Pilar 12 yang hanya 2,25—menghasilkan rentang kesenjangan sebesar 2,36 poin dalam satu entitas daerah. Kesenjangan ini mengisyaratkan bahwa Kepulauan Selayar belum berhasil mengubah keunggulan institusional dan SDM menjadi aktivitas ekonomi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Kondisi ini sering disebut sebagai *capability gap*—kemampuan tersedia tetapi belum tersalurkan menjadi nilai tambah ekonomi.

##### 2. Keterbatasan Konektivitas Geografis

Tidak tersedianya infrastruktur kereta api (skor 0,00) dan keterbatasan infrastruktur bandara (0,25) menciptakan biaya transaksi dan logistik yang tinggi, menghambat mobilitas barang dan orang, serta membatasi jangkauan pasar. Kondisi ini berdampak secara kumulatif terhadap seluruh dimensi pasar: melemahkan persaingan produk (Pilar 7 = 2,40), menghambat akses keuangan (Pilar 9 = 2,65), dan pada akhirnya menekan ukuran pasar efektif daerah.

##### 3. Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah

Skor rendah pada indikator Kapasitas Fiskal Daerah (2,62) mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai investasi infrastruktur, program inovasi, dan belanja pembangunan secara mandiri, sehingga menciptakan lingkaran keterbatasan yang perlu diputus melalui strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.

#### 4. Lemahnya Ekosistem Inovasi dan Riset

Dengan Belanja Riset hanya 0,68 dan Indeks Keunggulan Lembaga Riset mendekati nol (0,04), Kepulauan Selayar praktis belum memiliki ekosistem riset dan inovasi yang berfungsi. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mempersulit daerah untuk naik kelas ke model pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

##### 4.3 Analisis Komparatif dalam Konteks Sulawesi Selatan

Dalam konteks Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar menghadapi persaingan yang cukup ketat. Selisih skor dengan Kabupaten Bulukumba dengan skor 3,55—adalah 0,17 poin. Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, keduanya berada di wilayah selatan daratan Sulawesi Selatan, memiliki aksesibilitas yang lebih baik ke pasar Kota Makassar dibandingkan Kepulauan Selayar yang terpisah oleh Selat Selayar. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa faktor konektivitas dan aksesibilitas geografis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor IDSD secara keseluruhan.

Di sisi lain, Kepulauan Selayar mencatat skor di atas Luwu Timur (3,13), Luwu Utara (3,19), dan Luwu (3,36) yang merupakan daerah daratan di bagian timur Sulawesi Selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi geografis kepulauan tidak serta-merta menempatkan daerah ini pada posisi paling lemah—beberapa kekuatan daerah seperti tata kelola, adopsi TIK, dan keterampilan SDM berhasil mengimbangi keterbatasan geografis secara parsial.

Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah skor Pilar 6 (Keterampilan) Kepulauan Selayar sebesar 4,53 yang merupakan salah satu yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan—bahkan melampaui kota-kota besar seperti Makassar dan Parepare dalam dimensi ini. Keunggulan ini merupakan aset strategis yang perlu segera dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perbaikan di pilar-pilar yang masih lemah.

## BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap data IDSD 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai kondisi daya saing Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pertama, Kabupaten Kepulauan Selayar mencatat skor IDSD sebesar 3,38 pada tahun 2025—berada di bawah rata-rata nasional (3,50) dan rata-rata kabupaten/kota Sulawesi Selatan (3,53), menempatkan daerah ini pada peringkat ke-20 atau ke-21 dari 24 kabupaten/kota yang terukur di Sulawesi Selatan.

Kedua, profil daya saing daerah ini bersifat asimetris dengan pola yang khas. Pilar-pilar yang berkaitan dengan tata kelola institusi, adopsi teknologi, dan kualitas SDM menunjukkan kinerja yang kuat dan melampaui rata-rata nasional. Sebaliknya, pilar-pilar yang berkaitan dengan dinamika pasar, sistem keuangan, dan ekosistem inovasi mencatat skor yang jauh di bawah nasional—dengan Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi) menjadi yang paling membutuhkan perhatian serius, dengan selisih 1,29 poin di bawah rata-rata nasional.

Ketiga, kondisi geografis sebagai kabupaten kepulauan merupakan faktor kontekstual yang secara langsung membatasi capaian pada pilar infrastruktur (terutama transportasi udara dan kereta api) dan efisiensi pasar. Tantangan ini bersifat struktural dan memerlukan intervensi jangka panjang yang berkelanjutan.

Keempat, terdapat kesenjangan signifikan antara kekuatan institusional dan SDM yang dimiliki daerah dengan kemampuan mengubah kekuatan tersebut menjadi aktivitas ekonomi yang produktif dan inovatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada penutupan kesenjangan tersebut sebagai prioritas utama.

### 5.2 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan analisis, berikut adalah matriks rekomendasi kebijakan yang disusun secara terstruktur berdasarkan prioritas dan dimensi intervensi:

**Tabel 5.1 Matriks Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025**

No.	Prioritas Kebijakan	Pilar Terkait	Waktu	Rincian Intervensi
1	<b>Penguatan Konektivitas Transportasi</b>	Pilar 2, Pilar 8	Jangka Menengah–Panjang	Koordinasi dengan Kemenhub dan PUPR untuk peningkatan kapasitas bandara dan pelabuhan; pengembangan rute angkutan laut reguler antarpulau.
2	<b>Perluasan Akses Keuangan Inklusif</b>	Pilar 9	Jangka Pendek–Menengah	Mendorong ekspansi layanan bank dan lembaga keuangan mikro; memfasilitasi peningkatan penyerapan KUR dan pembiayaan UMKM perikanan.
3	<b>Penguatan Dinamika Bisnis dan Iklim Investasi</b>	Pilar 7, Pilar 11	Jangka Pendek	Penyederhanaan prosedur perizinan; penguatan kapasitas PTSP; penyusunan roadmap investasi berbasis sektor perikanan, dan pariwisata bahari.
4	<b>Pembangunan Ekosistem Riset dan Inovasi</b>	Pilar 12	Jangka Menengah–Panjang	Alokasi anggaran belanja riset dalam APBD; kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset; pengembangan kluster industri berbasis sumber daya lokal.
5	<b>Peningkatan Kapasitas Pasar Tenaga Kerja</b>	Pilar 8	Jangka Pendek–Menengah	Peningkatan cakupan program pelatihan vokasi; pemanfaatan Program Kartu Prakerja; penyesuaian kurikulum SMK/BLK dengan kebutuhan industri lokal.
6	<b>Peningkatan Indeks Kesehatan Daerah</b>	Pilar 5	Jangka Pendek–Menengah	Penguatan program JKN dan kesehatan masyarakat; peningkatan akses fasilitas kesehatan di pulau-pulau terluar; penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

### 5.2.1 Penguatan Konektivitas Transportasi

Sebagai daerah kepulauan, penguatan konektivitas merupakan prasyarat mendasar bagi peningkatan daya saing secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mengadvokasi secara aktif kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR untuk peningkatan status dan kapasitas Bandara H. Aroepala Selayar agar dapat melayani penerbangan yang lebih reguler dan terjangkau. Secara paralel, perlu didorong pengembangan dermaga dan fasilitas pelabuhan yang memadai, termasuk pengembangan rute angkutan laut antarpulau yang bersubsidi guna mengurangi disparitas harga barang antara pulau utama dan pulau-pulau kecil.

### 5.2.2 Perluasan Akses Keuangan Inklusif

Skor Kredit Swasta terhadap PDRB yang hanya 1,54 menunjukkan keterbatasan serius dalam akses pembiayaan. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi perluasan jangkauan layanan perbankan ke seluruh kecamatan, terutama di pulau-pulau terpencil, melalui pemanfaatan teknologi keuangan (*fintech*) dan program perbankan tanpa kantor (Laku Pandai). Program percepatan penyerapan KUR sektoral—khususnya untuk sektor perikanan, pariwisata bahari, dan pertanian—perlu dipromosikan secara aktif melalui kerja sama dengan perbankan dan OJK. Pengembangan koperasi simpan pinjam berbasis komunitas nelayan dan petani dapat menjadi alternatif solusi pembiayaan mikro yang lebih terjangkau dan relevan dengan konteks lokal.

### 5.2.3 Penguatan Dinamika Bisnis dan Iklim Investasi

Rendahnya Pertumbuhan NIB mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih proaktif dalam mendorong pertumbuhan wirausaha baru. Penguatan kapasitas PTSP dengan teknologi digital, pengurangan waktu dan biaya pengurusan perizinan, serta sosialisasi aktif kepada calon pengusaha lokal merupakan langkah yang dapat segera diimplementasikan. Pemerintah daerah juga perlu menyusun roadmap investasi daerah yang komprehensif berbasis sektor unggulan—khususnya pertanian, pariwisata bahari, perikanan dan budidaya laut, serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal—yang kemudian dipromosikan secara aktif kepada investor potensial melalui forum investasi regional dan nasional.

### 5.2.4 Pembangunan Ekosistem Riset dan Inovasi

Peningkatan Pilar 12 (Kapabilitas Inovasi) merupakan investasi jangka panjang yang tidak dapat diabaikan. Langkah konkret yang dapat ditempuh mencakup: peningkatan alokasi belanja riset dalam APBD secara bertahap; fasilitasi pendirian pusat kajian atau unit riset berbasis sektor unggulan (misalnya Pusat Riset Perikanan); kemitraan aktif dengan perguruan tinggi di Makassar dan tingkat nasional untuk penelitian terapan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan lokal; serta pengembangan klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dapat menjadi ekosistem inovasi bisnis. Pemanfaatan Kalkulator IDSD 2025 yang disediakan BRIN sangat direkomendasikan dalam proses penyusunan target

indikator untuk dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD.

### **5.2.5 Peningkatan Kapasitas Pasar Tenaga Kerja**

Skor Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif yang sangat rendah (0,57) mengindikasikan perlunya perluasan program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja secara signifikan. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan kuota dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja bagi angkatan kerja lokal; mengembangkan kerja sama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan vokasi (BLK, SMK) untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri lokal; serta mendorong pengembangan kompetensi di bidang pariwisata, pengolahan hasil laut, dan ekonomi digital yang relevan dengan potensi daerah.

### **5.2.6 Peningkatan Indeks Kesehatan Daerah**

Skor Pilar 5 (Kesehatan) sebesar 3,69 yang berada di bawah rata-rata nasional (3,79) mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai kabupaten kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses masyarakat di pulau-pulau terluar terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah terpencil, serta tingginya beban penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan gizi. Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup (AHH)—satu-satunya indikator pengukur Pilar Kesehatan—yang merupakan cerminan kualitas kehidupan jangka panjang masyarakat dan bersifat bertahap dalam perubahannya.

## **5.3 Penutup**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 memberikan gambaran yang lengkap dan terukur tentang posisi dan profil daya saing Kabupaten Kepulauan Selayar. Skor 3,38 bukanlah sebuah ketentuan yang bersifat mutlak, melainkan sebuah titik tolak yang dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang tepat, komitmen anggaran yang konsisten, dan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kekuatan yang sudah ada—terutama tata kelola yang baik dan

kualitas SDM yang cukup tinggi—merupakan modal nyata yang perlu segera dioptimalkan untuk mendorong perbaikan di dimensi-dimensi yang masih lemah.

Dengan memanfaatkan IDSD sebagai instrumen analitis dan perencanaan yang berbasis bukti, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kesempatan untuk menyusun intervensi pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan efisien. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan posisi daerah dalam peringkat IDSD, tetapi yang lebih penting, akan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kepulauan Selayar.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2025). Indeks Daya Saing Daerah 2025. Penerbit BRIN. ISSN: 2985-3303. DOI: 10.55981/brin.2438.
- Hanafi, I., et al. (2017). Productivity as the Main Determinant of Competitiveness. Dalam: Regional Competitiveness Index. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Onsel, S., et al. (2008). A New Perspective on the Competitiveness of Nations. Socio-Economic Planning Sciences, 42(4), 221–246. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2007.11.001>
- Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. The Free Press.
- World Economic Forum (WEF). (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Geneva: WEF.



## LAMPIRAN

### Skor Indikator Pembentuk Indeks Daya Saing Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2025

Pilar	Dimensi		Indikator	Skor Indikator	Skor Pilar
1: Institusi	Keamanan	1.01	Kejahatan Terorganisir	4,46	<b>4,61</b>
		1.02	Tingkat Pembunuhan (Rate)	4,40	
	<i>Checks and balances</i>	1.06	Transparansi Anggaran	5,00	
		1.08	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,94	
		1.09	Kinerja Instansi Pemerintah	5,00	
		1.10	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5,00	
	Transparansi	1.11	Upaya Pencegahan Korupsi	4,65	
	Hak atas Kepemilikan	1.12	Hak Atas Kepemilikan	2,94	
		1.13	Kualitas Administrasi Pertanahan	4,83	
	Orientasi Masa Depan Pemerintah	1.14	Tingkat pengelolaan lingkungan	4,85	
2: Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi (Jalan Darat)	2.01	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Aksesibilitas Jalan	5,00	<b>3,27</b>
		2.02	Kualitas Infrastruktur Jalan	4,07	
	Infrastruktur Transportasi (Jalur Kereta Api)	2.03	Layanan Infrastruktur Kereta Api	0,00	
	Infrastruktur Transportasi (Udara)	2.04	Layanan Infrastruktur Bandara	0,25	
	Infrastruktur Transportasi (Laut)	2.05	Layanan Infrastruktur Pelabuhan	3,37	
	Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)	2.06	Rasio Elektrifikasi	5,00	

<b>Pilar</b>	<b>Dimensi</b>		<b>Indikator</b>	<b>Skor Indikator</b>	<b>Skor Pilar</b>
	Infrastruktur Utilitas (Air)	2.08	Akses Air Minum Layak	4,76	
		2.09	Tingkat Kehilangan Air	3,68	
3: Adopsi TIK	Adopsi TIK	3.01	Pengguna Telepon Seluler	5,00	<b>4,36</b>
		3.02	Jangkauan Jaringan 4G	4,49	
		3.04	Pengguna Internet	3,58	
4: Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	4.01	Pertumbuhan Deflator PDRB	4,71	<b>4,10</b>
		4.02	Kapasitas Fiskal Daerah	2,62	
		4.03	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi	4,98	
		4.04	Indeks Ketahanan Pangan	4,05	
		4.05	Nilai Investasi	4,15	
5: Kesehatan	Kesehatan	5.01	Angka Harapan Hidup	3,69	<b>3,69</b>
6. Keterampilan	Tenaga Kerja Saat Ini	6.01	Rata-rata Tahun Sekolah	4,62	<b>4,53</b>
		6.02	Keterampilan Lulusan	4,00	
		6.04	Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil	5,00	
	Tenaga Kerja Masa Depan	6.05	Angka Harapan Sekolah	4,62	
		6.06	Berpikir Kritis dalam Mengajar	4,06	
		6.07	Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar	4,91	
7. Pasar Produk	Persaingan Domestik	7.02	Persaingan Sektor Jasa	2,40	<b>2,40</b>
8. Pasar Tenaga Kerja	Fleksibilitas	8.01	Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif	0,57	<b>2,45</b>
		8.02	Upah Pekerja	2,14	
	Meritokrasi dan Insentif	8.05	Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki	4,64	
9. Sistem Keuangan	Kedalaman	9.01	Persentase Kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku	1,54	<b>2,65</b>
		9.02	Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat (Rupiah)	2,82	

Pilar	Dimensi		Indikator	Skor Indikator	Skor Pilar
		9.04	Persentase Premi Asuransi Jiwa dan Non-Jiwa terhadap PDRB Harga Berlaku	3,60	
10. Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	10.01	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	3,72	<b>3,72</b>
11. Dinamika Bisnis	Persyaratan Administrasi	11.01	Pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB)	1,32	<b>2,50</b>
		11.03	Kinerja Pelayanan Publik	3,68	
12. Kapabilitas Inovasi	Keanekaragaman dan Kolaborasi	12.01	Keanekaragaman Tenaga Kerja	4,16	<b>2,25</b>
		12.02	Pengembangan Klaster	1,69	
	Riset	12.03	Publikasi Ilmiah	1,21	
		12.04	Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)	3,72	
		12.05	Belanja Riset	0,68	
		12.06	Indeks Keunggulan Lembaga Riset	0,04	
	Komersialisasi	12.07	Aplikasi Merek Dagang	4,24	

**Skor IDSD**

**3,38**